



Kekerasan dan Pemerasan Perempuan Pekerja Seks Komersial dalam Aplikasi MiChat: Suatu Analisis Foucaultian

Violence and Exploitation of Female Commercial Sex Workers on the MiChat Application: A Foucaultian Analysis

Moh. Ruslan Aditiya Sanjani*, Departemen Sosiologi, Universitas Airlangga, Indonesia

ABSTRACT

The rapid rise of internet communication has transformed interactions, including business, relationships, and even the search for commercial sex through platforms like MiChat. This study explores violence, such as intimidation, coercion, and abuse, alongside exploitation, including blackmail and forced payments, within this digital landscape. Using Foucaultian perspective on power and resistance, it highlights how digital technology becomes a battleground for power dynamics in the sex industry. Employing qualitative methods, the research examines sex workers using MiChat as a social and economic platform through observations, interviews, and documentation. Findings reveal that while these workers gain autonomy in their profession, they remain susceptible to exploitation and violence from clients. However, sex workers resist these oppressions, illustrating a struggle for agency. Power dynamics emerge as clients use financial leverage and violence, whereas sex workers, particularly women, counteract these controls to reclaim their autonomy.

ARTICLE HISTORY

Received 05/01/2025
Revised 18/01/2025
Accepted 20/01/2025
Published 27/02/2025

KEYWORDS

MiChat; online prostitution; violence; resistance; digital power relations; commodification of the body.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ aditiasanjani@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.10546>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara bertransaksi dalam industri seks komersial. Perkembangan ini mencakup berbagai bidang, seperti teknologi, budaya, ekonomi, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Faktor-faktor seperti inovasi, penemuan baru, dan perubahan sosial berperan dalam membentuk perkembangan zaman (Ngafifi, 2014). Tidak hanya itu, perkembangan teknologi digital memungkinkan mengekspresikan kreativitas masyarakat yang mereka miliki dalam platform yang media digital, seperti video dalam YouTube, TikTok dan lain sebagainya, serta gambar dan tulisan yang juga bisa diunggah di sosial media lain seperti Instagram, Twitter (X), Facebook dan sebagainya (Habibah & Irwansyah, 2021). Media sosial memberikan panggung besar bagi seluruh masyarakat untuk kerap menunjukkan karya-karya mereka sehingga banyak mendapatkan *like* dan komentar dari banyak orang yang memungkinkan mereka menyukai konten yang diberikan atau tidak menyukainya.

Media sosial juga memberikan akses kepada penggunanya untuk bisa berkomunikasi secara cepat kepada orang lain yang menggunakan media sosial yang sama (Irfan et al., 2022). Transformasi digital ini tidak hanya mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan mengakses informasi, tetapi juga telah menciptakan ruang-ruang baru untuk aktivitas yang berada area abu-abu secara hukum dan moralitas. Salah satu manifestasi perubahan ini adalah penggunaan aplikasi perpesanan untuk memfasilitasi prostitusi *online*, di mana aplikasi MiChat telah muncul sebagai medium yang dominan dalam transaksi seks komersial di Indonesia.

Platform digital seperti MiChat pada awalnya dikembangkan sebagai aplikasi komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan keluarga dan teman melalui fitur obrolan yang menyenangkan. Diluncurkan pada tahun 2018 oleh perusahaan asal Singapura, aplikasi ini menawarkan berbagai fitur standar seperti pengiriman pesan teks, foto, dan pesan suara. Namun,

kemampuan aplikasi untuk mendeteksi pengguna dalam radius 5-20 kilometer telah menciptakan peluang yang tidak terduga untuk aktivitas prostitusi *online*.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan. Selama periode Januari hingga April 2021, tercatat 35 kasus eksploitasi seksual, perdagangan anak, dan pekerja anak, dengan total korban mencapai 234 anak. Yang lebih mengkhawatirkan, 83% dari kasus tersebut terkait dengan prostitusi, dengan MiChat menjadi platform yang paling sering digunakan, mencakup 41% dari total kasus yang tercatat (KPAI, [2021](#)). Fakta bahwa sebagian besar korban masih berusia sekolah dasar menunjukkan tingkat kerentanan yang sangat tinggi dalam penggunaan teknologi digital untuk eksploitasi seksual.

Fenomena prostitusi *online* melalui MiChat memiliki karakteristik yang berbeda dari bentuk prostitusi konvensional. Berdasarkan observasi di kawasan Kedung Tarukan, Mojo, dan Gubeng Surabaya. Para Pekerja Seks Komersial (PSK), menggunakan aplikasi ini untuk memasarkan layanan mereka dan bernegosiasi dengan calon pelanggan. Profil pengguna sering kali secara eksplisit mencantumkan daftar harga yang bervariasi sesuai dengan jenis layanan yang ditawarkan. Praktik ini menunjukkan bagaimana teknologi digital telah mengubah cara transaksi seks komersial dilakukan, memberikan tingkat anonimitas dan privasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional.

Penelitian terdahulu telah berupaya memahami berbagai aspek dari fenomena ini. Farhan et al. telah mengidentifikasi karakteristik PSK yang menggunakan MiChat, dengan fokus pada profil sosial-ekonomi dan motivasi mereka. Studi ini mengungkapkan bahwa tekanan ekonomi menjadi faktor pendorong utama keterlibatan dalam prostitusi *online* (Farhan et al., [2023](#)). Sementara itu, penelitian lain memberikan kontribusi penting dalam memahami struktur operasional prostitusi *online*, dengan membedakan antara PSK yang beroperasi di bawah gerbong dan mereka yang bekerja secara mandiri (Azahra & Aprison, [2022](#); Damayanti et al., [2022](#)).

Penelitian hukum terhadap anak memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong keterlibatan dalam prostitusi, mengidentifikasi berbagai aspek seperti pola hidup, kebutuhan sehari-hari, dan dorongan psikologis (Hehalatu et al., [2022](#)). Temuan mereka diperkuat oleh penelitian lain yang mengungkap kasus-kasus di mana perempuan menjadi korban penipuan oleh agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya memaksa mereka terlibat dalam industri seks komersial (Jagad & Hartoyo, [2022](#)).

Meskipun studi-studi tersebut telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami prostitusi *online*, terdapat kesenjangan penting dalam literatur yang ada mengenai dinamika relasi kuasa antara PSK dan konsumen dalam konteks transaksi digital. Penggunaan aplikasi seperti MiChat telah menciptakan ruang interaksi baru yang mengubah dinamika kekuasaan tradisional dalam industri seks komersial. Platform digital ini tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi, tetapi juga membentuk pola relasi dan interaksi yang berbeda antara penyedia dan pengguna jasa.

Hasil observasi awal di Surabaya menunjukkan bahwa PSK yang menggunakan MiChat menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi yang unik dalam konteks digital. Mulai dari ketidaksesuaian kontrak layanan, pembayaran yang tidak sesuai perjanjian, hingga ancaman dan intimidasi, bentuk-bentuk kekerasan ini mencerminkan kompleksitas relasi kuasa dalam ruang digital. Kerentanan ini diperparah oleh stigma sosial dan keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum, yang membuat banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan.

Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk relasi kuasa yang terjadi dalam transaksi seks komersial melalui MiChat. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek ekonomi dan operasional, penelitian ini

menggunakan perspektif relasi kuasa untuk memahami bagaimana teknologi digital mengubah dinamika hubungan antara PSK dan konsumen. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana platform digital dapat baik memberdayakan maupun meningkatkan kerentanan PSK.

Signifikansi penelitian ini terletak pada beberapa aspek penting yang menjadikannya relevan dalam konteks dinamika kekuasaan di era digital, khususnya dalam industri seks komersial. Pertama, penelitian ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana teknologi digital, seperti platform MiChat, menciptakan perubahan signifikan dalam dinamika relasi kuasa antara PSK, pelanggan, dan perantara. Studi ini menyoroti celah dalam literatur yang ada, di mana banyak penelitian sebelumnya cenderung hanya membahas aspek ekonomi dan hukum prostitusi *online* tanpa mengupas secara mendalam bagaimana teknologi memengaruhi hubungan kekuasaan dalam transaksi seks komersial.

Kedua, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi kebijakan yang lebih terarah dan berbasis bukti. Dalam konteks perlindungan hak-hak PSK di era digital, studi ini menawarkan wawasan yang spesifik untuk merancang kebijakan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak-hak dasar pekerja, termasuk akses ke keadilan, keamanan, dan layanan pendukung. Dengan fokus pada celah yang ada, penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan akan kebijakan yang inklusif dan sensitif terhadap perkembangan teknologi.

Ketiga, temuan penelitian ini berpotensi menjadi landasan dalam mengidentifikasi strategi untuk mengurangi risiko eksploitasi, kekerasan, dan kontrol berlebihan yang dialami PSK dalam konteks prostitusi *online*. Fokus pada relasi kuasa memberikan kebaruan dalam memahami bagaimana platform digital membentuk mekanisme kontrol dan pengaruh antara pelaku-pelaku dalam ekosistem prostitusi.

Lebih lanjut, penelitian ini memperhatikan konteks sosial-budaya Indonesia, sebuah negara dengan mayoritas penduduk beragama, di mana prostitusi sering dianggap melanggar norma agama dan sosial. Perspektif ini menambah kebaruan penelitian dengan menganalisis bagaimana nilai-nilai agama dan budaya yang dominan berinteraksi dengan tekanan ekonomi dan sosial yang mendorong prostitusi *online*. Dengan demikian, studi ini menghadirkan pandangan yang lebih kontekstual dalam memahami dinamika prostitusi di Indonesia, serta bagaimana intervensi dapat dirancang untuk menyeimbangkan norma-norma budaya dengan realitas sosial.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif mendalam untuk menggali pengalaman dan perspektif PSK yang menggunakan MiChat sebagai platform utama. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana teknologi digital ini membentuk ulang relasi kuasa, termasuk dampaknya terhadap otonomi dan kerentanan pekerja. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjawab celah dalam literatur terkait relasi kuasa dalam prostitusi digital, serta memberikan kontribusi praktis dalam mengembangkan kebijakan dan intervensi yang lebih relevan di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk memahami secara mendalam relasi kuasa antara PSK dan konsumen dalam konteks penggunaan aplikasi MiChat. Pemilihan pendekatan fenomenologi didasarkan pada kebutuhan untuk memahami pengalaman hidup (*lived experience*) para PSK yang tidak dapat dikuantifikasi melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengungkap makna subjektif dari relasi kuasa yang terbentuk antara PSK dan konsumen dalam ruang digital, serta menangkap kompleksitas fenomena yang melibatkan berbagai nuansa sosial-budaya dalam praktik prostitusi *online* (Iskandar, 2009).

Fenomenologi dipilih karena kemampuannya mengeksplorasi kesadaran subjektif informan dalam memaknai pengalaman mereka sebagai PSK yang menggunakan platform digital. Berbeda

dengan penelitian survei kuantitatif yang bertujuan mengukur dan mencari faktor-faktor terbangunnya relasi kuasa, pendekatan kualitatif yang digunakan lebih fokus pada upaya memahami secara detail dan mendalam bentuk relasi kuasa dan wacana dalam konteks eksploitasi perempuan PSK yang dilakukan oleh konsumen.

Penelitian ini dilakukan di Surabaya, sebuah kota metropolitan dengan tingkat penggunaan teknologi digital yang tinggi dan memiliki sejarah panjang terkait praktik prostitusi. Pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan keberadaan berbagai tempat yang diidentifikasi sebagai lokasi beroperasinya PSK, memberikan konteks yang kaya untuk penelitian ini.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan beberapa kriteria spesifik (Moleong, 2000). Informan harus merupakan perempuan PSK yang aktif menggunakan aplikasi MiChat minimal selama 6 bulan, beroperasi di wilayah Surabaya, berusia minimal 18 tahun, dan bersedia berbagi pengalaman secara mendalam. Dari sekitar 40 pengguna MiChat yang teridentifikasi dalam radius 200 meter hingga 8 kilometer, enam informan terpilih berdasarkan kriteria tersebut dan kesediaan mereka berpartisipasi dalam penelitian. Pengumpulan data yang terbatas ini karena kesulitan peneliti untuk menemukan informan yang cocok dengan tema penelitian ini. Selain itu, banyak akun palsu dengan menggunakan foto wanita “seksi” namun pada kenyataannya adalah seorang laki-laki yang ingin mengambil keuntungan dengan unsur penipuan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam yang bersifat semi-terstruktur dengan durasi 60-90 menit per sesi. Wawancara mencakup tema-tema seperti pengalaman menggunakan MiChat, dinamika relasi dengan konsumen, bentuk-bentuk eksploitasi yang dialami, dan strategi menghadapi situasi berbahaya. Seluruh wawancara direkam dengan izin informan dan dilakukan di lokasi yang aman dan nyaman bagi mereka. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi digital terhadap profil pengguna MiChat dan dokumentasi pola interaksi dalam aplikasi.

Aspek etika penelitian mendapat perhatian khusus dalam studi ini. Setiap informan akan dirahasiakan identitas dan lokasi tempat tinggal mereka untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan mereka dalam membantu penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Creswell yang dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan penting untuk memastikan keakuratan dan validitas hasil penelitian. Tahap pertama adalah pengorganisasian data, yang melibatkan proses transkripsi wawancara verbatim secara hati-hati untuk memastikan semua informasi yang diberikan oleh informan tercatat secara utuh (Creswell, 2018). Setelah itu, peneliti melakukan pembacaan berulang terhadap transkrip untuk mendalami konteks, mencatat gagasan awal, dan mengidentifikasi tema-tema potensial yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

Aspek keakuratan data juga menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan strategi triangulasi data untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari informan. Hal ini melibatkan perbandingan data dari berbagai sumber, seperti wawancara mendalam dengan informan lain, pengamatan langsung, serta tinjauan literatur yang mendukung. Pendekatan ini dirancang untuk mengurangi potensi bias dan meningkatkan keandalan hasil penelitian.

Namun, dalam konteks dokumentasi visual atau material pendukung lainnya, penelitian ini menghadapi keterbatasan karena pertimbangan etika penelitian. Dokumentasi berupa rekaman atau foto tidak digunakan untuk menjaga kerahasiaan identitas dan melindungi privasi informan. Peneliti memprioritaskan perlindungan hak-hak informan dengan memastikan bahwa data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan akademis dan tidak disalahgunakan.

Tahap akhir dalam analisis data adalah penyusunan narasi dan visualisasi temuan, yang dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena yang diteliti. Proses ini melibatkan pengembangan argumen teoretis yang didukung oleh data empiris, sehingga menghasilkan interpretasi yang mendalam tentang dinamika relasi kuasa dalam prostitusi *online*. Selain itu, refleksi terhadap temuan dilakukan untuk menilai relevansi dan dampaknya terhadap kerangka teoretis dan implikasi praktis yang lebih luas.

Melalui kombinasi metode pengumpulan data yang ketat, analisis yang sistematis, dan perhatian khusus terhadap akurasi serta integritas data, penelitian ini tidak hanya bertujuan menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena prostitusi *online* di era digital, tetapi juga memberikan kontribusi bermakna terhadap pengembangan teori dan kebijakan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pekerja Seks Komersial (PSK) yang menggunakan MiChat berbeda dengan PSK yang tinggal di lokasi tertentu, misalnya lokasi tertentu. Para PSK tidak perlu bertemu langsung dengan calon pelanggan untuk memberikan layanan konsumen. Dengan kata lain, tidak perlu adanya kontak langsung. Mereka hanya bisa melayani konsumen dengan berkomunikasi melalui MiChat dan menggunakan nomor ponsel sebagai kelanjutan komunikasi akan keseriusan dalam transaksi ini.

Dalam penggunaan nama *user*, informan menggunakan nama-nama yang membuat konsumen menjadi semakin tertarik, di antaranya @Sindi, @Aleyaa, @Tante Kamu. Penggunaan nama *user* ini sengaja menggunakan nama samara untuk melindungi privasi *user* PSK untuk terus bisa beroperasi dalam aplikasi ini. Selain itu mereka menunjukkan foto mereka dalam bio atau profil. Foto atau video di sini ditunjukkan untuk juga menarik perhatian para konsumen. Berbagai foto yang ditampilkan seperti foto pribadi dengan berpakaian vulgar dan foto testimoni orang-orang yang pernah melakukan atau seks atau pernah melakukan transaksi dengan para PSK ini.

Pekerja Seks Komersial yang menggunakan MiChat dapat melakukan aktivitasnya kapan saja dan di mana saja. Hal ini memudahkan mereka untuk mempromosikan profil dan layanan seksnya. Kemudahan komunikasi yang menjangkau konsumen melalui MiChat. Para PSK tidak perlu keluar ke jalan untuk melamar calon pelanggan atau berjuang untuk meyakinkan mereka tentang minat konsumen. Pekerja Seks Komersial yang menggunakan MiChat dapat dengan mudah berkomunikasi secara *online* dan menawarkan layanan seksual kepada calon klien jika mereka tertarik.

MiChat mengacu pada PSK independen. Artinya melakukan tindakan prostitusi tanpa keterlibatan atau campur tangan pihak lain. Mereka adalah PSK yang mengurus urusannya sendiri ketika berhadapan dengan konsumen. Hal ini memungkinkan para PSK untuk menikmati kemenangan mereka secara pribadi tanpa harus membaginya jika para PSK memiliki hubungan dengan seorang *germo*. Setiap PSK berpotensi menjadi pelanggan tetap, dan layanan seksual yang berkualitas dan memuaskan dapat mengubah konsumen menjadi pelanggan setia. Demikian pula, para PSK yang menggunakan MiChat memiliki pelanggan yang menggunakan layanan ini secara rutin. Kehadiran klien-klien tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi para PSK.

Bentuk-Bentuk Eksploitasi PSK

Penelitian ini berupaya untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi perempuan relasi gender dalam aplikasi MiChat. Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui pengamatan, berikut adalah analisisnya.

Ketidakadilan dan Eksploitasi Perempuan

Terdapat beberapa kasus penipuan pada Pekerja Seks Komersial (PSK), di mana individu yang terlibat dalam praktik prostitusi atau menjadi subjek dalam kegiatan pornografi sering kali mengalami situasi tersebut karena terancam oleh pemaksaan, perlakuan yang tidak sesuai, menjadi korban penjualan (*debt bondage*), atau menjadi korban penipuan. Analisis data dari tiga contoh penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi seksual yang terjadi melibatkan penggunaan bahasa verbal yang mengandung unsur seksual oleh konsumen di luar kontrak yang telah disepakati.

PSK sering dilihat sebagai individu yang memenuhi keinginan seksual para pelanggan dengan menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada awal transaksi. Dengan kata lain, layanan seksual yang diberikan oleh PSK dihubungkan dengan fungsi untuk memuaskan hasrat seksual klien, dan tarif atau biaya yang ditentukan sebelumnya menjadi bagian integral dari perjanjian mereka. Konsumen yang memberikan atau mengendalikan uang dapat menciptakan ketergantungan pada penerima uang, yaitu perempuan. Dinamika dalam transaksi seksual menciptakan suatu hubungan kekuasaan. Dalam konteks ini, konsumen yang memberikan pembayaran memiliki kendali atau kekuasaan atas pihak yang menerima pembayaran, yaitu Pekerja Seks Komersial (PSK). Peran finansial konsumen memberikan kontrol atau pengaruh pada situasi tersebut, menciptakan relasi kekuasaan di mana konsumen memiliki kendali dalam hubungan tersebut melalui aspek moneter.

Michel Foucault, dalam bukunya *Discipline and Punish*, menyatakan bahwa tubuh manusia terikat oleh ruang dan waktu karena keberadaan kekuasaan di luar dirinya (Foucault, 1977). Menurut Foucault, kekuasaan membentuk tubuh untuk tunduk pada wacana yang diterima oleh masyarakat. Wacana ini mengendalikan tubuh manusia, sehingga gerakan dan perilakunya dimanipulasi. Kebijakan dari wacana tersebut melahirkan konsep "anatomi politik" (Foucault, 1977), yang menggambarkan bagaimana kekuasaan bekerja dengan menguasai tubuh orang lain. Tujuannya bukan hanya untuk membuat mereka melakukan sesuatu, tetapi juga agar mereka dapat berfungsi sesuai keinginan dengan teknik, kecepatan, dan ketepatan tertentu. Dengan demikian, muncul disiplin yang membentuk tubuh, namun tubuh yang dihasilkan adalah tubuh yang patuh dan selalu berada dalam praktik-praktik disiplin tersebut.

"...ada pelanggan itu kalo aneh-aneh kalau mau main mas." (informan @Aleyaa)

Michel Foucault menjelaskan bahwa tubuh merupakan arena di mana kekuasaan beroperasi melalui praktik-praktik sosial, budaya, dan ekonomi yang mengatur, mengawasi, dan mendisiplinkan individu (Foucault, 1990). Dalam konteks PSK yang menggunakan aplikasi seperti MiChat sebagai alat komunikasi, tubuh mereka bukan hanya menjadi objek komodifikasi, tetapi juga berada di bawah pengawasan mekanisme kekuasaan yang lebih besar. Mekanisme ini mencakup norma sosial, kontrol oleh pihak-pihak tertentu, serta sistem kapitalisme yang melingkupinya.

"...profil itu ya harus rapi, pakai bedak, lipstik. Terus di bio itu aku kasi deskripsi kayak berat sama tinggi badan. Jadi orang-orang tertarik. Kalau di rumah ya pakai biasa saja" (informan @Tante Kamu)

Dalam konteks digital, konsep "*biopower*" sebagaimana dijelaskan oleh Foucault, menemukan bentuk operasionalnya yang baru dan lebih kompleks. *Biopower*, yang pada dasarnya adalah kekuasaan untuk mengatur kehidupan, tubuh, dan populasi, kini bertransformasi melalui teknologi digital yang mengintegrasikan pengawasan, regulasi, dan kontrol ke dalam sistem yang tak kasatmata tetapi sangat menentukan. Dalam prostitusi *online*, tubuh perempuan PSK tidak lagi hanya diatur oleh regulasi formal seperti hukum dan kebijakan, atau regulasi informal seperti stigma sosial dan norma moral, tetapi juga oleh mekanisme digital yang menciptakan layer baru dalam relasi kuasa.

Platform digital seperti aplikasi prostitusi *online* menjadi instrumen *biopower* yang signifikan. Melalui fitur-fitur seperti *rating*, algoritma pencarian, dan ulasan pengguna, platform ini mengatur bagaimana tubuh perempuan PSK dikonstruksi, dinilai, dan diakses. Sebagai contoh, algoritma menentukan visibilitas PSK berdasarkan popularitas atau kriteria tertentu, yang secara langsung memengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan klien. Fitur-fitur ini, meskipun tampak netral, berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang mengarahkan perilaku dan preferensi baik dari PSK maupun klien. Tubuh perempuan tidak hanya menjadi objek dalam transaksi, tetapi juga menjadi komoditas yang diukur, diatur, dan dioptimalkan oleh sistem digital.

Namun, *biopower* dalam konteks digital juga membuka ruang bagi negosiasi dan resistensi. Perempuan PSK yang bekerja di platform digital sering kali menemukan cara untuk memanfaatkan sistem demi keuntungan mereka. Mereka dapat mengadopsi strategi seperti menciptakan identitas *online* yang berbeda untuk melindungi privasi, atau memanipulasi algoritma dengan meningkatkan jumlah ulasan positif melalui klien terpercaya. Tindakan ini mencerminkan bahwa meskipun *biopower* bekerja secara masif dalam sistem digital, tetap ada ruang bagi individu untuk menegosiasikan kekuasaan dan bahkan menantanginya.

Selain itu, *biopower* digital juga memunculkan bentuk kekerasan baru yang lebih halus, seperti kekerasan simbolik yang diungkap oleh Bourdieu. Misalnya, standar kecantikan atau deskripsi layanan yang ditetapkan oleh platform dapat menciptakan tekanan psikologis dan ekspektasi yang membatasi kebebasan PSK dalam menentukan cara mereka bekerja. Kekuasaan dalam konteks ini tidak selalu terlihat melalui paksaan langsung, tetapi beroperasi melalui mekanisme yang menginternalisasi norma tertentu ke dalam perilaku PSK. Dengan demikian, sistem digital tidak hanya menjadi medium yang memfasilitasi prostitusi, tetapi juga menjadi arena di mana kekuasaan dan resistensi terus-menerus diproduksi dan dinegosiasikan.

“Ada pelanggan yang mau main minta yang aneh-aneh sambil *ngirim* 'gambar-nya itu,' ya aku mau-mau saja sih mas, tapi ada batas seperti main belakang itu aku *gak* mau.” (Informan @Erni)

Foucault juga membahas konsep panoptikon, yang mengacu pada pengawasan, baik yang nyata maupun imajiner, untuk membentuk perilaku individu. Dalam hal ini, PSK yang menggunakan MiChat sering kali menghadapi dampak pengawasan sosial. Namun, mereka juga membangun strategi untuk mengelola tubuh mereka, seperti menentukan batasan layanan seksual sebagai bentuk pengelolaan risiko dan upaya menjaga martabat pribadi.

Relasi kekuasaan, menurut Foucault, tidak selalu bersifat represif. Kekuasaan juga produktif, karena menciptakan subjek yang sadar akan posisi dan strategi mereka. Dalam konteks ini, PSK bukan hanya korban dari struktur kekuasaan, tetapi juga agen yang mampu memanfaatkan celah untuk mendapatkan penghidupan, sambil tetap menavigasi batasan yang diberikan oleh mekanisme kekuasaan tersebut.

Kekerasan (Violence)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kekerasan terhadap perempuan PSK merupakan masalah serius yang meliputi berbagai jenis kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Pekerja Seks Komersial (PSK) rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Meskipun demikian, mereka sering kali tidak mendapatkan perlindungan dan perhatian yang memadai. Hal ini disebabkan oleh pandangan negatif masyarakat terhadap pekerjaan mereka, sehingga PSK kesulitan untuk melawan secara hukum atau mencari bantuan legal. Pandangan masyarakat yang merendahkan pekerjaan tersebut membuat mereka menjadi rentan terhadap eksploitasi dan sulit mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka miliki.

PSK juga sering kali dimanfaatkan dengan memberi ancaman serius dari konsumen. PSK tersebut kemudian melakukan pekerjaan atau pelayanan tanpa kesediaannya secara sukarela. Kondisi ini mencerminkan situasi di mana seseorang, yang disebut sebagai budak, tengah dikendalikan atau dikuasai oleh orang lain.

“Pernah ada om-om yang main sama aku, dia kasar banget mas. Ya *gimana* lagi, soalnya aku minta bayaran lebih.” (Informan @Sari)

Adanya ketidaksetaraan kekuasaan di mana pelanggan memiliki kendali penuh terhadap Sari yang dianggap sebagai budak. Perbudakan umumnya terjadi dalam rangka memenuhi kegiatan seksual. Dari konteks tersebut, dapat diamati bahwa terdapat praktik perbudakan atau pemaksaan yang terjadi melalui penggunaan *beans/geft* sebagai alat pertukaran untuk kepuasan seksual. Praktik ini dapat dianggap sebagai bentuk perbudakan karena selain mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh konsumen, para perempuan ini sering kali mendapat ancaman untuk diungkapkan identitasnya dengan menggunakan media sosial sehingga memaksa mereka untuk tunduk dan patuh pada konsumen.

Perempuan yang mengalami kekerasan akan mengalami gangguan fisik dan mental yang dapat menghambat kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan. Gangguan ini dapat menyebabkan penurunan harga diri dan jiwa yang tertekan. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan sosial budaya. Artinya, perempuan dapat mengalami bentuk-bentuk kekerasan yang melibatkan aspek fisik, mental, seksual, ekonomi, dan konteks sosial dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bersifat multidimensional dan tidak hanya terbatas pada satu bentuk kekerasan saja.

Kekuasaan diukur melalui tingkat ketergantungan suatu pihak pada pihak lain terkait sumber daya atau layanan yang dimiliki (Haliq, 2014). Dalam konteks PSK dalam praktik prostitusi *online* dengan menggunakan aplikasi MiChat seperti hasil dari observasi penelitian, konsumen merupakan pemegang kekuasaan dalam interaksinya dengan PSK. Untuk memperkuat dominasinya, konsumen menggunakan berbagai bentuk kekerasan, baik secara psikologis, fisik, maupun ekonomi terhadap PSK. Posisi kekuasaan konsumen diperkuat oleh ketidaknyamanan PSK dalam melaporkan kekerasan yang mereka alami. Kekerasan dalam hubungan merupakan isu sosial yang dapat mempengaruhi siapa pun. Selain membahayakan aspek fisik, kekerasan dalam hubungan juga berdampak pada kesejahteraan mental, menciptakan perasaan rendah diri pada korban.

Kekerasan yang dialami oleh PSK yang menggunakan MiChat sebagai alat komunikasi dapat dianalisis melalui teori Michel Foucault mengenai relasi kuasa, di mana tubuh pekerja menjadi objek kontrol dalam sistem yang lebih besar. Kekerasan, baik fisik maupun verbal, mencerminkan bagaimana kekuasaan terinternalisasi dalam hubungan antara PSK dan pelanggan. Ketidapatuhan terhadap permintaan pelanggan dapat berujung pada tindakan kekerasan sebagai cara untuk menegakkan kontrol atas tubuh PSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tubuh PSK sering kali kehilangan kendali atas dirinya sendiri dalam dinamika pekerjaan mereka, terikat oleh tuntutan eksternal yang memperkuat relasi kuasa yang menindas.

Relasi Kuasa PSK

Kekuasaan dianggap bersifat mutlak dan tidak selalu tergantung pada kesadaran manusia. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Michel Foucault, yang menyatakan bahwa kekuasaan dianggap sebagai suatu strategi (Foucault, 2000). Dalam konteks penelitian yang disebutkan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rizal M, seorang aktor agama dan mantan anggota DPRD menjadi figur yang mengendalikan kekuasaan di lokasi Gunung Sampan. Meskipun DPRD Situbondo tidak berhasil

menegakkan peraturan daerah tentang pelarangan pelacuran, aktor agama, Kiai Baidowi, mengambil alih peran tersebut dengan pendekatan yang lebih humanis dan religius. Kiai Baidowi menggunakan pengetahuan agama untuk menormalisasi kehidupan PSK dan menciptakan pengajian mingguan sebagai upaya mengontrol mereka. Dalam pengelolaan kekuasaan, aktor agama tersebut memanfaatkan pengetahuan agama untuk meraih simpati PSK di Gunung Sampan dan berusaha agar mereka meninggalkan prostitusi dengan kesadaran sendiri (Rizal M et al., [2021](#)).

Konsep Foucault tentang kontrol tubuh dalam konteks era modern. Menurut Foucault, dalam era ini, tubuh seseorang dikendalikan atau diawasi oleh kekuasaan yang bersumber dari institusi (Foucault, [1977](#)). Dengan kata lain, institusi memiliki peran dalam mengatur gerak dan perilaku tubuh individu yang terhubung dengan institusi tersebut. Gagasan ini mencerminkan bagaimana norma-norma, aturan, dan nilai-nilai yang diterapkan oleh institusi mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan tubuh mereka dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam fenomena yang lain misalnya, PSK yang berada dalam pengawasan mucikari ini tentu memberikan kuasa pada mucikari dan pengetahuan dia sebagai mucikari membangun suatu kontrol atas perempuan untuk tetap setia dalam menjalankan pekerjaan mereka. Namun dalam penelitian ini, perempuan PSK membangun relasinya sendiri tanpa adanya mucikari, hal ini bisa dilihat bahwa pemegang kekuasaan adalah konsumen dengan kontrol yang dimilikinya berupa uang.

Foucault mengemukakan bahwa pembahasan mengenai seksualitas tidak dapat dipisahkan dari konteks kekuasaan dan pengetahuan, di mana budaya dibangun untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang bersifat patriarkal (Foucault, [1990](#)). Budaya dikonstruksi sedemikian rupa untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang bersifat patriarkal, di mana peran dan kontrol atas seksualitas terjadi dalam konteks relasi kekuasaan yang kompleks. Prostitusi melibatkan risiko kekerasan fisik dan seksual dari pihak pelanggan laki-laki dan kadang-kadang juga dari perantara seperti mucikari atau mami. Dengan demikian, pandangan Foucaultian menyoroti keterkaitan antara seksualitas, kekuasaan, dan struktur kebudayaan yang dapat membentuk dan memengaruhi pengalaman individu dalam konteks prostitusi.

Menurut Foucault, kekuasaan telah menciptakan kondisi di mana tubuh menjadi tunduk pada suatu kebijakan koersi, yang secara efektif mengambil kendali atas tubuh manusia (Foucault, [1977](#)). Dalam konteks ini, gerak dan perilaku tubuh selalu dimanipulasi oleh kebijakan koersi tersebut. Konsekuensinya, terbentuklah apa yang disebut sebagai anatomi politik, di mana kekuasaan berperan sebagai alat untuk mengontrol orang lain, memungkinkan pelaksanaan kekuasaan dalam bentuk kinerja yang memanifestasikan dominasi (Zaidan, [2020](#)).

Kekuasaan tidak hanya berasal dari luar, melainkan juga dapat berasal dari dalam, mempengaruhi struktur, norma, dan interaksi. Pemahaman ini sesuai dengan pandangan Michel Foucault ([2000](#)). Selanjutnya, pandangan Shofman menekankan bahwa perempuan, anak perempuan, dan anak-anak yang terlibat dalam prostitusi dianggap sebagai korban. Shofman menggunakan pendekatan sosial-gender untuk mendeskripsikan kisah-kisah prostitusi, yang mencerminkan pandangan etis-ideologis bahwa prostitusi bukanlah hasil dari pilihan bebas, terutama karena gagasan pilihan itu dianggap tidak relevan dalam konteks kehidupan perempuan yang terlibat di dalamnya. Dalam naratif yang dibentuk oleh Shofman, citra PSK dianggap sebagai produk dari determinisme sosial, sehingga mereka selalu dipandang sebagai korban dalam situasi tersebut.

Resistensi

Pembahasan mengenai relasi kekuasaan dalam prostitusi seharusnya tidak terbatas pada kekuasaan dari negara, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan aktor bayangan negara, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Ramadhan ([2018](#)). Hal ini juga mencakup aktor agama seperti yang

ditemukan dalam penelitian Rizal M (2021) dan preman sebagai tokoh kuat lokal yang menerapkan konsep patronase dalam penelitian Gadiansah (2010), di mana PSK selalu ditempatkan dalam posisi yang dikuasai (*domain of power*).

Pemahaman kekuasaan sebenarnya dipandang sebagai ketergantungan satu pihak terhadap pihak lain dalam hal sumber daya atau layanan yang bernilai, seperti yang dikemukakan oleh Emerson dalam Ritzer. Pandangan Foucaultian menambahkan dimensi baru dengan menyatakan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh negara; sebaliknya, kekuasaan adalah bentuk relasi, artinya di mana ada relasi, di situ ada kekuasaan (Ritzer, 2014). Dengan kata lain, PSK memiliki potensi untuk memiliki 'kekuasaan' terhadap pelanggan mereka, yang menandakan bahwa perempuan tidak hanya dipandang sebagai objek, tetapi juga dapat dianggap sebagai subjek dalam dinamika kekuasaan.

Melalui konsep diskursus, Foucault menggambarkan bahwa kekuasaan sebenarnya tidak terpusat atau terkonsentrasi di satu titik tertentu. Sebaliknya, kekuasaan tersebar dan terwujud melalui hubungan-hubungan sosial, termasuk dalam cara orang berbicara, mendiskusikan, dan membentuk pengetahuan (Foucault, 2000). Diskursus, dalam pemikiran Foucault, tidak hanya sebagai bentuk komunikasi verbal, tetapi juga sebagai praktik-praktik yang membentuk realitas sosial. Dalam konteks ini, kekuasaan dihasilkan dan dipertahankan melalui berbagai bentuk diskursus yang terjadi dalam masyarakat. Pemahaman ini memandang bahwa kekuasaan bukan hanya berasal dari institusi-institusi formal, seperti negara atau pemerintah, tetapi juga terwujud dalam interaksi sehari-hari, norma-norma sosial, dan produksi pengetahuan. Dengan demikian, konsep diskursus Foucault menekankan bahwa kekuasaan bersifat difusi, hadir dalam berbagai tingkatan, dan dapat ditemukan dalam praktik-praktik sehari-hari yang membentuk cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia.

“Aku *ngga* suka kalo banyak tanya mas, apalagi *nawar* dengan harga jauh, tak blok *aja* sama aku, daripada *ngeladenin customer* gak jelas.” (Informan @Intan)

Langkah awal dalam perlawanan akan eksploitasi dalam konteks prostitusi yang dilakukan menggunakan MiChat ini adalah memblokir calon konsumen yang hanya membutuhkan informasi yang tidak penting, bahkan meminta para perempuan PSK ini untuk terus mengeluarkan kata-kata jorok yang memancing nafsu mereka tanpa dibayar. Usaha ini sering kali dilakukan untuk menghindari para calon konsumen menikmati percakapan yang dirasa mempunyai elemen yang bisa membangkitkan hawa nafsu mereka.

Kemudian mengorganisir diri merupakan suatu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para PSK pada konsumen yang melakukan tindakan kekerasan. Selain itu wacana untuk membangun identitas diri sebagai PSK terus digalakkan hanya untuk melawan para konsumen yang terus-menerus mengancam untuk membongkar identitas mereka. Dalam konteks PSK, terbentuknya diskursus sosial ini mencerminkan penguatan identitas diri para PSK sebagai bagian dari kelompok tersebut. Identitas diri sebagai PSK menjadi elemen sentral dalam percakapan atau narasi sosial yang mereka bentuk, sebagai cara untuk mengatasi stigmatisasi atau merespons realitas sosial yang mereka hadapi. Diskursus sosial ini dapat mencakup berbagai elemen, seperti narasi pengalaman hidup, pandangan terhadap pekerjaan mereka, serta upaya untuk memahami dan mendefinisikan kembali peran mereka dalam masyarakat.

“Ada juga yang aku *post*, buat *temen-temen* yang lain tahu kalo ada *customer* *gini* jangan dihiraukan. Soalnya dia *nipu* kita *aja* nantinya.” (informan @Mawar).

Di sisi lain PSK yang mengekspos atau menentang kekerasan yang mereka alami dalam pekerjaan seksual melakukan tindakan yang dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap

ketidakadilan dan penindasan. Tindakan ini dapat melibatkan berbagai strategi, seperti pengungkapan pengalaman mereka melalui media, advokasi untuk hak-hak PSK, dan partisipasi dalam gerakan atau organisasi yang berkomitmen untuk melawan kekerasan dan diskriminasi terhadap PSK. Dengan cara ini, PSK mencoba membuka ruang untuk mendiskusikan isu-isu yang terkait dengan keamanan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia mereka.

Pekerja seks (PSK) menggunakan media, termasuk platform daring, sebagai sarana untuk menyebarkan narasi alternatif dan melawan kuasa. Melalui media, PSK dapat mengungkapkan pengalaman dan perspektif mereka, menciptakan ruang untuk berbicara tentang isu-isu yang relevan dengan pekerjaan seksual, serta menantang stereotip dan stigmatisasi yang sering terkait dengan profesi mereka. Penggunaan media ini memberikan peluang bagi PSK untuk memperoleh dukungan, menyuarakan tuntutan hak-hak mereka, dan membangun solidaritas di antara sesama PSK atau kelompok advokasi yang mendukung perubahan positif dalam perlakuan terhadap mereka.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas relasi kuasa dan komodifikasi tubuh dalam konteks PSK yang menggunakan platform digital MiChat di Surabaya. Temuan penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami dinamika industri seks komersial, dari narasi yang sebelumnya memosisikan perempuan sebagai subjek tidak bermoral menjadi pemahaman yang lebih kompleks tentang relasi kuasa dalam konteks permintaan pasar.

Hasil analisis mengindikasikan bahwa komodifikasi tubuh perempuan PSK tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi gestur dan emosional dalam pelayanan. Tubuh perempuan dalam konteks ini menjadi objek yang dimodifikasi dan dioptimalkan untuk memenuhi tuntutan pasar. Namun, pada saat yang sama, para PSK juga memiliki *agency* dalam menentukan batasan dan negosiasi dengan klien mereka. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam industri seks komersial bersifat dinamis dan tidak selalu dominatif sepihak.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa otonomi tubuh menjadi aspek krusial dalam memahami posisi PSK dalam relasi kuasa. Para PSK sering kali berada dalam posisi yang memungkinkan mereka membentuk hubungan kekuasaan dengan klien mereka, meskipun dalam batasan-batasan tertentu yang ditentukan oleh kesepakatan bisnis. Namun, keterbatasan dalam menentukan orientasi tubuh semakin terlihat ketika tubuh perempuan dijadikan komoditas yang menghasilkan keuntungan bagi pihak lain, baik platform digital maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam ekosistem prostitusi.

Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kekuasaan dalam industri seks komersial di era digital. Temuan ini memberikan implikasi penting, baik untuk pengembangan kebijakan maupun upaya praktis yang lebih efektif dalam menangani permasalahan prostitusi. Pendekatan kriminalisasi terhadap PSK terbukti tidak efektif, sering kali malah memperburuk stigma dan kerentanan PSK. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis, yang tidak hanya berfokus pada aspek legal, tetapi juga mempertimbangkan pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya.

Beberapa rekomendasi konkret dapat diusulkan berdasarkan temuan penelitian ini. Pertama, pembuat kebijakan perlu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi PSK, seperti pelatihan keterampilan kerja alternatif yang memungkinkan mereka untuk memperoleh penghasilan di luar industri seks komersial. Kedua, platform digital yang digunakan dalam transaksi prostitusi perlu diawasi secara ketat, dengan regulasi yang melindungi PSK dari eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran privasi. Ketiga, perlu diupayakan kampanye publik untuk mengurangi stigma terhadap

PSK, sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan, hukum, dan sosial tanpa rasa takut atau malu.

Di sisi lain, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan yang mempertimbangkan konteks sosial-budaya Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama, pendekatan berbasis nilai-nilai agama dan budaya lokal yang inklusif dapat menjadi salah satu strategi untuk menjembatani resistensi masyarakat terhadap isu ini. Misalnya, inisiatif berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama atau masyarakat dapat menjadi sarana untuk mendukung PSK tanpa menghakimi mereka.

REFERENSI

- Azahra, F., & Aprison, W. (2022). Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi Online Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, 1(6), 294–298. <https://doi.org/10.31004/anthor.vii6.49>
- Creswell, J. W. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Sage Publication.
- Damayanti, I., Hidayat, Y., & P, R. (2022). Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi Online di Banjarmasin. *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)*, 2(1). <https://doi.org/10.20527/pakis.v2i1.5199>
- Farhan, M., Nurbayan, St., & Nurhasanah. (2023). Fenomena Prostitusi Online Dengan Menggunakan Aplikasi MiChat di Desa Nisa Kecamatan Wohe Kabupaten Bima. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 5(2). <https://stkipbima.ac.id/jurnal/index.php/ES/article/view/997>
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Pantheon Books.
- Foucault, M. (1990). *The History of Sexuality*. Pantheon Books.
- Foucault, M. (2000). *Seks dan Kekuasaan*. Gramedia.
- Gadiansah, B. (2010). Prostitusi dan Kekuasaan di Jantung Yogyakarta (Sebuah studi politik mengenai peranan preman sebagai local strongmen dalam melindungi keberadaan praktek prostitusi di kampung Pasar Kembang, Sosrowijayan. *Master Thesis*. Universitas Gajah Mada.
- Habibah, A. F., & Irwansyah, I. (2021). Era Masyarakat Informasi sebagai Dampak Media Baru. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(2), 350–363. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i2.255>
- Haliq, F. (2014). Perilaku Politik Kelas Menengah Madura. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 22(2), 194–206.
- Hehalatu, N., Hehanussa, D. J. A., & Supusepa, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat. *PATTIMURA: Legal Journal*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.47268/pela.vii.5897>
- Irfan, I., Azmin, N., & Arifuddin, A. (2022). Peranan Keluarga dalam Pendidikan Anak Pasca Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bima. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(12), 5393–5396. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1255>
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gaung Persada.
- Jagad, R. P., & Hartoyo. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Prostitusi Online Menggunakan Sarana Aplikasi MiChat. *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 243–267. <https://doi.org/10.25139/lex.v6i2.5662>
- KPAI. (2021). Hasil Pengawasan KPAI Tentang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual Dan Pekerja Anak Bulan Januari s.d April : Dari 35 Kasus Yang Dimonitor KPAI, 83% Kasus Prostitusi, Jumlah Korban Mencapai 234 Anak. <https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-234>
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1). <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>
- Ramadhan, S., Riswanda, R., & Indriyany, I. A. (2018). Redefinisi Relasi Kekuasaan: Fenomena Industri Seks Komersial di Kota Serang. In *Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan 2018 : Peranan Ilmu Sosial dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia*. Untirta Press. <https://eprints.untirta.ac.id/951/7/Prosiding%20Semnas%20IP%202018%20FIX.pdf>
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*. Pustaka Pelajar.

- Rizal M, M. K., Bandiyah, & Mahaswari, M. (2021). Relasi Kuasa Aktor Agama dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) pada Lokalisasi Gunung Sampan. *Politika Udayana*, 1(2).
<https://media.neliti.com/media/publications/521497-none-a3d74408.pdf>
- Zaidan, Y. F. (2020). Relasi Tubuh dan Kekuasaan: Kritik Sandra Lee Bartky Terhadap Pemikiran Michel Foucault. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 5(2).
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jaqfi/article/view/9054/4995>